

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah untuk tujuan pemenuhan peraturan maupun persyaratan yang ditetapkan pemerintah antara lain perizinan, pembayaran pajak, laporan ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Dengan adanya hubungan kerja sama tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan pada setiap perusahaan. Hasil dari melakukan pengawasan, akan dapat membantu pemerintah guna menetapkan suatu kebijakan terkait ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pada Disnaker kota Surabaya terdapat tiga bidang utama, yaitu:

1. Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja (Penta).
2. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Syaker).
3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Wajib lapor perusahaan merupakan bagian dari fungsi yang ada pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu melakukan pemeriksaan, penerapan, pengkajian dan pengawasan ketenagakerjaan. Hingga saat ini jumlah kumulatif perusahaan di kota Surabaya yang telah melakukan wajib lapor kurang lebih 12.654 perusahaan dengan jumlah kumulatif tenaga kerja kurang lebih 1.490.062 orang.

Proses wajib lapor dimulai dari perusahaan yang datang ke Disnaker mengisi *form* dan melengkapi persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh

perusahaan baru dalam melakukan wajib lapor adalah membawa salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah melakukan wajib lapor, membawa salinan wajib lapor tahun sebelumnya. Jika kelengkapan data dan persyaratan wajib lapor sudah sesuai, dibuatkanlah disposisi oleh Bagian Tata Usaha yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jika *form* wajib lapor mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pengawasan dan Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka dilakukan pengisian nomor pendaftaran wajib lapor dan pencatatan berkas wajib lapor. Kemudian *form* wajib lapor diserahkan ke Kepala Bidang Pengawasan, Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sekretaris Disnaker, dan Kepala Disnaker untuk penandatanganan *form* wajib lapor yang selanjutnya diserahkan pada pihak perusahaan. Data dari arsip *form* wajib lapor di *inputkan* dalam komputer menggunakan *Microsoft Excel*. Data-data tersebut nantinya diolah menjadi informasi yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan Kepala Disnaker Kota Surabaya.

Dari tahap-tahap proses yang telah dijelaskan diatas terdapat kendala-kendala yang terjadi, yaitu pencatatan data wajib lapor menggunakan *Microsoft Excel* untuk mengolah laporan ketenagakerjaan sehingga membutuhkan  $\pm 6$  hari dalam proses pengolahan, pencarian dan pembuatan laporan, serta terbatasnya informasi yang didapatkan. Dalam satu minggu Kepala Bidang Pengawasan dan Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial melakukan pekerjaan diluar kantor dua hingga tiga kali yang mengakibatkan terhambatnya proses persetujuan karena belum adanya fasilitas yang dapat menunjang dalam memberikan persetujuan

wajib lapor saat pihak yang bersangkutan berada diluar kantor. Untuk memenuhi kebutuhan proses persetujuan maka diperlukan sistem *online* yang dapat mempersingkat waktu proses persetujuan dan pembuatan wajib lapor. Belum adanya sistem notifikasi bagi Disnaker maupun perusahaan untuk melakukan wajib lapor kembali, yang mengakibatkan 52% dari 1978 perusahaan yang melakukan wajib lapor per tahun terlambat melakukan wajib lapor kembali. Data wajib lapor yang banyak dapat berpotensi sebagai penghambat dalam pembuatan laporan pada Disnaker Provinsi Jawa Timur dikarenakan membutuhkan waktu dalam proses pengelolaannya.

Dari Kendala-kendala yang ada maka diperlukan sistem informasi pelaporan ketenagakerjaan untuk Disnaker kota Surabaya yang berbasis *website*. Dengan berbasis *website*, mempermudah setiap perusahaan melakukan pengisian wajib lapor dengan memberikan informasi lengkap mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Selain itu, *website* digunakan untuk memfasilitasi Kepala Bidang Pengawasan dan Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam memberikan persetujuan wajib lapor saat berada diluar kantor sehingga dapat mempercepat proses pembuatan wajib lapor. Sistem informasi ini juga dapat membantu Disnaker dalam menangani pencatatan, pencarian, pengolahan data wajib lapor dengan cepat dan tepat sehingga mempermudah dalam pembuatan laporan. Laporan-laporan yang dibutuhkan yaitu laporan perusahaan dan tenaga kerja yang dirinci menurut kewarganegaraan, status permodalan, besar kecil perusahaan, serta sektor dan jenis satuan yang diberikan serta laporan data perusahaan yang tidak melakukan wajib lapor kembali. Selain itu, sistem akan memberikan notifikasi untuk perusahaan dan

Disnaker apabila terdapat perusahaan yang belum melakukan pelaporan ketenagakerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem notifikasi diharapkan Disnaker mampu memberikan kebijakan untuk perusahaan, sehingga perusahaan tidak terlambat melakukan wajib lapor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam Tugas Akhir ini yaitu bagaimana merancang bangun sistem informasi pelaporan ketenagakerjaan pada Disnaker kota Surabaya?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kasus untuk wajib lapor perusahaan ini, hanya mencakup perusahaan diwilayah kerja Disnaker kota Surabaya.
2. Perancangan sistem informasi didasarkan pada proses *form* wajib lapor.
3. Aplikasi ini dibangun dengan berbasis web.
4. Aplikasi ini tidak membahas masalah keamanan jaringan

## **1.4 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat mempermudah setiap perusahaan dalam melakukan wajib lapor ketenagakerjaan.

2. Sistem dapat memfasilitasi Kasie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kepala Bidang Pengawasan, Sekretaris Disnaker dalam memberikan persetujuan wajib lapor ketenagakerjaan.
3. Sistem dapat mengetahui data dan jumlah perusahaan yang telah melakukan wajib lapor, terlambat melakukan wajib lapor, dan belum melakukan wajib lapor kembali.
4. Sistem dapat mempercepat dan mempermudah dalam pembuatan laporan yang sesuai dengan kebutuhan Disnaker.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan ini akan berisi tentang hal-hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian dan perumusan masalah dalam membuat Sistem Informasi Pelaporan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Selain itu pada bab ini akan ditentukan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini serta batasan-batasan dari sistem yang dibuat.

### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini berisi tentang berbagai landasan teori yang dipakai dalam pembuatan Sistem Informasi Pelaporan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Pada Bab Landasan Teori meliputi: Perusahaan, Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Laporan Ketenagakerjaan, Wajib Lapor, Data, Sistem Informasi, Komponen dan Tipe Sistem Informasi, *System Flow*, *Data Flow Diagram*, *Database*, PHP, SDLC.

### **Bab III Analisis dan Perancangan Sistem**

Pada bab ini berisi tahapan-tahapan sistematis yang digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dalam pembuatan sistem informasi ini. Tahapan-tahapan tersebut merupakan kerangka acuan yang dijadikan dasar pembuatan sistem informasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Dalam bab ini terdapat paparan mengenai struktur program dan alur program.

### **Bab IV Implementasi dan Evaluasi**

Bab evaluasi dan implementasi berisi tentang kebutuhan akan perangkat keras, perangkat lunak serta tampilan halaman utama *login* sampai dengan tampilan akhir dari sistem yang dibuat berupa laporan yang dibutuhkan.

### **Bab V Penutup**

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang ada pada bab ini didapatkan dari hasil evaluasi sistem, sedangkan saran akan menjelaskan masukan untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut.